

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling telah dipetakan sejak kurikulum 1975, yang menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah (Yusuf dan Nurihsan, 2008: 96). Kemudian dinyatakan sebagai bagian dari kurikulum dalam Permen Diknas No. 22/2006 tentang Standar Isi yang menyebutkan, konselor atau guru bimbingan dan konseling memfasilitasi kegiatan pengembangan diri siswa melalui kegiatan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, belajar dan pengembangan karir. Oleh karena itu, eksistensi layanan bimbingan dan konseling tidak cukup hanya dengan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam belajarnya. Lebih jauh dari itu, layanan bimbingan dan konseling juga harus menjadi ujung tombaknya tercapainya keberhasilan tujuan pendidikan baik secara nasional maupun yang lebih khusus dirumuskan oleh sekolah.

Berdasarkan urgensi keberadaan layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan maka penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga memerlukan sistem yang teratur, terarah, dan terinci mulai dari rancangannya, pelaksanaannya hingga proses evaluasi hasilnya. Karena program bimbingan dan konseling tidak hanya memberikan pengaruh terhadap keberhasilan perkembangan siswa secara psikologis. Lebih jauh dari itu, program bimbingan dan konseling menjadi ruh penentu keberhasilan pendidikan bagi siswa.

Dengan demikian, keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah harus terprogram, terstruktur dan dikelola dengan baik. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Tresna (2011: 12), program bimbingan dan konseling merupakan bagian yang cukup mendasar dalam menunjang keberhasilan kegiatan layanan

bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini karena program bimbingan dan konseling merupakan suatu keputusan awal dan menentukan yang harus diambil oleh pemegang kebijakan pendidikan di sekolah bagi terwujudnya kegiatan bimbingan dan konseling sekolah yang baik dan memberikan manfaat bagi semua siswa. Lebih lanjut Tresna (2011: 13) mengungkapkan, dalam pengembangan program bimbingan dan konseling, para *stakeholder* hendaknya bermusyawarah untuk menentukan filosofi, misi, fungsi dan isi keseluruhan program. Dasar pengembangan program yang lengkap merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa program bimbingan dan konseling sekolah menjadi suatu bagian utuh dari seluruh program pendidikan untuk keberhasilan para siswa.

Langkah awal dalam pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu merancang program bimbingan dan konseling yang baik. Proses ini bukan hanya menjadi syarat penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang baik akan tetapi juga menjadi salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008, tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bimbingan dan konseling, yakni pada butir D mengenai kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Dalam butir D tersebut, dirumuskan kompetensi yang harus dimiliki guru bimbingan dan konseling dalam merancang program bimbingan dan konseling yang komprehensif (Yusuf, 2009: 67)

Berbicara mengenai kompetensi tidak hanya terbatas pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lebih jauh dari itu, kompetensi merupakan serangkaian pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang dalam menjalankan sebuah profesi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 (10) yang menyatakan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Definisi lain menjelaskan, kompetensi merupakan wujud profesionalisme dan tanggung jawab penuh yang harus ditunjukkan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yang mengemukakan, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Dalam Surat Keputusan tersebut juga dikemukakan, kompetensi terdiri dari beberapa elemen yaitu: (1) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu dan keterampilan; (3) kemampuan berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (5) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Tingkat kompetensi seseorang juga berkaiatan erat dengan beberapa aspek dalam kehidupannya, diantara yang memberikan pengaruh tersebut yaitu perbedaan usia, masa kerja dan latar belakang pendidikan (Simanjuntak, 2005: 40). Hal tersebut karena kompetensi merupakan akumulasi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mana ketiga hal tersebut dipengaruhi oleh pengalaman hidup seseorang dalam menjalani sebuah pekerjaan, sehingga beberapa perbedaan tersebut seringkali dikaitkan dengan tingkat kompetensi seseorang dalam sebuah pekerjaan.

Lebih khusus mengenai kompetensi guru bimbingan dan konseling disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 menyebutkan, kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam merancang program bimbingan dan konseling yaitu, memiliki kompetensi dalam menganalisis kebutuhan konseling, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara

komprehensif dengan pendekatan perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, serta merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kompetensi terbagi atas tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Maka untuk merancang program bimbingan dan konseling yang baik, guru bimbingan dan konseling perlu memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai untuk merancang program bimbingan dan konseling. Lebih lanjut mengenai kompetensi pengetahuan, Spencer menjelaskan (1993: 11), kompetensi pengetahuan merupakan hal mendasar dari kompetensi dan mudah untuk dikembangkan. Dengan demikian, hal pertama dan mendasar yang harus dimiliki guru bimbingan dan konseling dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu, kompetensi pengetahuan atau pemahaman tentang proses merancang program bimbingan dan konseling komprehensif.

Dalam kenyataannya, urgensi pemahaman upaya merancang program bimbingan dan konseling komprehensif tidak serta merta menjadi perhatian penting sekolah. Jangankan para *stakeholder* sekolah, guru bimbingan dan konseling pun masih banyak yang kurang memperhatikan hal ini. Sebagaimana yang terungkap dari hasil studi yang dilakukan Kartadinata (Nadia, 2008: 22) berkaitan dengan mutu bimbingan di SMA se-Jawa Barat menunjukkan bahwa mutu bimbingan masih perlu ditingkatkan, diantaranya dalam hal pengembangan program bimbingan dan konseling dan pembinaan profesional, yang masih memerlukan penataan secara sistematis. Hasil penelitian yang dilakukan Nadia (2008) juga menunjukkan kondisi yang hampir sama, yakni pengelolaan program bimbingan dan konseling oleh para guru bimbingan dan konseling di kota Pangkal Pinang kurang memadai, diantaranya dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, terutama dalam penilaian kebutuhan, merumuskan tujuan dan prioritas program, penggunaan teknik-teknik

bimbingan, serta pelaksanaan layanan konseling individual maupun kelompok. Kurang memadainya kemampuan mengembangkan program bimbingan dan konseling komprehensif, disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern, yakni kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru bimbingan dan konseling berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan faktor ekstern, yaitu partisipasi siswa yang rendah dan kurangnya dukungan dari personel terkait, serta belum adanya pengawas bimbingan dan konseling khusus, sehingga tidak optimal (Nadia, 2008: 109-111).

Kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling pun belum teridentifikasi dari sisi perbedaan usia, masa kerja dan latar belakang pendidikan dalam pengaruhnya terhadap tingkat kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling.

Sementara di kabupaten Bandung Barat, sebagai kabupaten yang baru berdiri kurang lebih tujuh tahun, keberadaan layanan bimbingan dan konseling masih membutuhkan banyak perhatian. Terutama dalam hal rancangan program, dengan alasan kondisi perkembangan siswa pada umumnya sama, sering kali program bimbingan dan konseling terutama di Sekolah Menengah Atas Negeri kurang mendapat pembaharuan. Selain itu, kebanyakan guru bimbingan dan konseling menganggap bahwa program bimbingan dan konseling hanya merupakan kebutuhan administrasi. Padahal, keberadaan program bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah mengarahkan dan memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling (Gysbers dan Henderson, 2006: 53). Kondisi ini tentu memerlukan pemecahan dalam rangka mencapai kualitas guru bimbingan dan konseling yang memiliki kompetensi handal. Dengan demikian, pengkajian mengenai gambaran kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif, merupakan hal penting untuk dikaji dalam rangka mendukung

upaya layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah berbanding lurus dengan kualitas kompetensi guru bimbingan dan konseling. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas layanan bimbingan dan konseling yang kurang memuaskan besar kemungkinan berkaitan erat dengan kompetensi guru bimbingan dan konseling yang kurang diperhatikan. Sebagai salah satu aspek penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang berkualitas, kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling dalam merancang program bimbingan dan konseling seharusnya menjadi perhatian penting. Namun, kondisi yang terjadi justru sebaliknya, kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling, terutama dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif stagnan. Selain itu, perbedaan usia, masa kerja dan latar belakang pendidikan juga belum diidentifikasi pengaruhnya terhadap tingkat kompetensi pengetahuan.

Berdasarkan identifikasi di atas, masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan dalam pertanyaan: “Bagaimana gambaran kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling SMA Negeri Di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Ajaran 2013/2014 dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif?”

Masalah utama penelitian di atas, dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran umum kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Ajaran 2013/2014 dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif?
2. Bagaimana gambaran kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling

SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Ajaran 2013/2014 dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif berdasarkan perbedaan usia, masa kerja dan latar belakang pendidikan?

3. Bagaimana gambaran kebutuhan guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Ajaran 2013/2014 untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif ?

Dari rumusan masalah di atas, ditemukan satu variabel yang menjadi pokok penelitian, yaitu kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Secara umum penelitian bertujuan menghasilkan profil kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling SMA Negeri Di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Ajaran 2013/2014 dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif

2. Tujuan khusus

Adapun secara khusus, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi profil kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Ajaran 2013/2014 dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif.
- b. Mengidentifikasi secara empiric gambaran kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Ajaran 2013/2014 dalam merancang program bimbingan dan

konseling komprehensif berdasarkan perbedaan usia, masa kerja dan latar belakang pendidikan

- c. Mengeksplorasi kebutuhan guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Ajaran 2013/2014 untuk meningkatkan pengetahuan dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, dengan mengambil populasi penelitian guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat dan penentuan sampel melalui teknik sampel jenuh.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengembangkan instrumen penelitian berupa kuisisioner mengenai kompetensi pengetahuan guru bimbingan dan konseling dalam merancang program bimbingan dan konseling komprehensif.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan, penelitian diharapkan memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praksis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Dalam upaya mengembangkan khasanah keilmuan dalam bidang bimbingan dan konseling, penelitian diharapkan dapat memperkaya informasi dan pemahaman mengenai pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif, sehingga mampu memperluas dan memperdalam perkembangan layanan bimbingan dan konseling yang profesional.

Asri Kmilah, 2014

Kompetensi Pengetahuan Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Merancang Program Bimbingan Dan Konseling Komprehensif Di Sekolah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Manfaat Praktis

Keberlangsungan layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi semakin profesional. Bagi pihak guru bimbingan dan konseling, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan pemahaman merancang program bimbingan dan konseling yang komprehensif dan bagi kepala sekolah hasil penelitian diharapkan menjadi informasi berharga untuk meningkatkan dukungan terhadap layanan bimbingan dan konseling. Adapun untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi informasi ilmiah yang berharga untuk dikaji lebih mendalam.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari lima bab, dimulai dengan bab satu mengenai pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Selanjutnya bab dua mengenai kajian pustaka, dimana dalam bab ini membahas mengenai teori tentang kompetensi pengetahuan dan teori tentang merancang program bimbingan dan konseling komprehensif. Dilanjutkan dengan bab tiga mengenai metode penelitian, yaitu mengkaji tentang sampel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian dan mengembangkannya, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Hasil yang didapat dari bab tiga kemudian dideskripsikan dan dibahas di bab empat. Terakhir, bab lima yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan pemaknaan dari hasil penafsiran pada temuan penelitian.